



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUKARDI**
2. Jabatan : **WAKIL BUPATI**
3. NHK : **538732**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 4.020.700.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/104 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah Seluas 7200 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 432.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m2/160 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
5. Tanah Seluas 2340 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 304.200.000
6. Tanah Seluas 650 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 84.500.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 1.136.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



4. MOBIL, CHERY OMODA 5 LUXURY 1,5 (4X2)AT MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.7 V A/T JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.782.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 280.496.808

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 9.219.796.808

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.219.796.808

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.